



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

Skripsi

**KARAKTERISTIK KOMITE DEWAN KOMISARIS
DAN MEKANISME *GOVERNANCE*
PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI**

Oleh:

**PUTRI RANIE PRATIWI
04 153 044**

Mahasiswa Program S1 Jurusan Akuntansi

*Untuk Memenuhi Sebahagian Dari Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

PADANG

2008

ABSTRACT

Interest in board committees as part of overall corporate governance has increased dramatically in recent years, with a specific emphasis on existence which is based on the BI regulation. This research aims at identifying the effect of existence of the board committees on firms performance. Moreover, the research is unique because delve deeper into the function of the board by investigating the affect to the gender of important board committees on firms performance as measured by ROE & BOPO. The unit of analysis are 11 banks registered on the Indonesian Stock Exchange for the time period 2003 - 2006.

The study result are as follow: (1) the existence of the board committees and female representation on the board committees is positive influence to the banks performance as measured by ROE, but negative influence to the bank performance as measured by BOPO, (2) on partial of the research find that the existence of the board committees (remuneration & nomination committee and management risk policy committee) is positive influence to the bank performance as measured by ROE, but negative influence to the banks performance as measured by BOPO, (3) female representation on the board committees (audit committees and management risk policy committees) is positive influence to the banks performance as measured by ROE, but negative influence to the banks performance as measured by BOPO. The result is different in compare to female representation on the remuneration & nomination committee which is negative influence to the banks performance as measured by ROE and positive influence to the banks performance as measured by BOPO.

Keywords: *Board Committees, Governance Mechanism, Female Representation, Indonesia Bank Regulation.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan institusi kepercayaan, dimana masyarakat menyimpan danaanya untuk kemudian disalurkan dalam bentuk kredit. Pentingnya peran perbankan bagi perekonomian menuntut pengelolaan yang transparan, sehingga krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan semata-mata disebabkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya *good corporate governance* dan etika yang melandasinya (KNKCG, 2004). Hal ini menyebabkan industri perbankan tidak dapat secara berhati-hati (*prudent*) dalam mengelola likuiditas keuangan dan resiko kreditnya. Usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila ~~dilakukan~~ tiga tindakan penting lain yaitu : (i) Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian; (ii) Pelaksanaan *good corporate governance*; dan (iii) Pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank (KNKCG, 2004)

Corporate Governance menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan ~~dalam~~ perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan (Monks & Minow, 2003). Dalam hal ini mencakup hubungan antara manajemen perusahaan, dewan ~~perusahaan~~, *shareholders* dan semua *stakeholders* lainnya (OECD, 2004).

Salah satu kunci keberhasilan penerapan *corporate governance* di sektor perbankan adalah terhanggunya kerangka operasi (*framework*) dengan tiga pilarnya, yaitu kecukupan modal, pengawasan yang efektif dan transparansi/keterbukaan yang diharapkan mampu menjadi sistem preventif dalam mencegah terjadinya penyimpangan di perbankan (Ikatan Komite Audit Indonesia/IKAI, 2004). Pilar kedua (pengawasan yang efektif) merupakan pilar yang memegang peranan penting dan merupakan isu vital dalam kerangka pengawasan (*oversight*) perbankan di Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan karena berdasarkan pengamatan atas berbagai penyimpangan yang terjadi di sektor perbankan, mayoritas permasalahan tersebut bersumber dari lemahnya pengawasan (IKAI, 2004). Untuk itu diperlukan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan yang istimewa dengan direksi dan manajemen dimana hal tersebut merupakan elemen pendukung dalam menerapkan *corporate governance*.

Untuk dapat bekerja secara tepat guna dalam suatu lingkungan usaha yang kompleks, fungsi *control* yang diemban oleh *board of commissioners* (Dewan Komisaris) harus mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada berbagai komite. Adanya komite-komite ini merupakan suatu sistem yang bermanfaat untuk dapat melaksanakan pekerjaan Dewan Komisaris secara lebih rinci dengan memusatkan perhatian Dewan Komisaris kepada bidang khusus perusahaan atau *governance* yang lebih baik oleh manajemen. Menurut PBI No 8/4/PBI/2006 tentang keberadaan komite (Pasal 12) menjelaskan bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dewan komisaris wajib membentuk paling kurang 3 komite yaitu komite audit, komite remunerasi dan nominasi serta komite pemantau resiko. Dewan Komisaris dapat membentuk komite remunerasi dan nominasi secara terpisah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sesuai peraturan BI baru-baru ini No. 8/4/PBI/2006 yang mewajibkan pembentukan dewan komite sekurang-sekurangnya 3 komite (komite audit, komite remunerasi dan nominasi, komite pemantau resiko), maka penelitian ini berupaya untuk mengetahui pengaruh keberadaan *board committees* dan *female representation on the board committees* terhadap kinerja bank yang diukur dengan ROE dan BOPO. Penelitian ini juga meneliti pengaruh secara parsial mengenai keberadaan dan *female representation* pada masing-masing komite tersebut terhadap kinerja. Kesimpulan dari hasil penelitian secara simultan maupun secara parsial adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian secara simultan menemukan bahwa keberadaan *board committees* dan *female representation on the board committees* berpengaruh positif terhadap kinerja bank yang diukur dengan ROE dan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat efisiensi bank yang diukur dengan BOPO.
2. Dari hasil penelitian secara parsial menujukkan bahwa keberadaan *board committees* yaitu komite audit, komite remunerasi dan nominasi serta komite pemantau resiko (satu jika bank memiliki satu komite, dua jika memiliki dua komite, tiga jika memiliki tiga komite dan seterusnya) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROE negatif signifikan terhadap BOPO.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, B., Renee, and Ferreira, Daniel (2004): *Gender Diversity in the Board Room*, www.ssrn.com
- Anderson et al (2004): *Board of Directors, Audit Committees and The Information Content of Earnings*. Lerner College of Business of Economic 2004
- Baridwan, dkk (2004): *Kontroversi Seputar Standarisasi Komite Audit*. Executive Summary Konvensi Nasional IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia).
- Bradbury, M.E et al (2004): *Board Characteristic, Audit Committees Characteristic and Abnormal Accruals*. www.ssrn.com
- C., Sandra and Munoz, Vera (2005): *Corporate Governance Reforms: Redefined Expectations of Audit Committees Responsibilities and Effectiveness*. www.ssrn.com
- Carcello, Joseph, and Terry Neal (2000): *Audit Composition and Auditor Reporting*. www.ssrn.com
- Carter, A., David et al (2007): *The Diversity of Corporate Board Committees and Firm Financial Performance*. www.ssrn.com
- Chourou et al (2001): *Corporate Governance and Earning Management*. www.ssrn.com
- Conyon, J., Martin and He, Lerong (2004): *Compensation Committees and CEO Compensations Incentives in US Entrepreneurial Firms*. www.ssrn.com
- Crespi, Rafel and Gispert, Carles (1998): *Board Remuneration, Performance and Corporate Governance in Large Spanish Companies*. www.ssrn.com
- Daniri, Mas, Achmad (2007): *Sistem Remunerasi Direktur dan Komisaris sesuai Pedoman GCG*. www.governance-indonesia.com